

---

## Transaksi Ideologi Dalam Novel *Rabet, Runtuhnya Jerman Timur* Karya Martin Jankowsky: Kajian *New Historicism*

Asykuri

Dosen STKIP Bina Insan Mandiri, Surabaya

### Abstrak

*Sastra, pada hakikatnya telah menyuarakan pemikiran pengarang. Pemikiran pengarang dalam sebuah sastra bisa terkait dengan pemikiran dunia yang meliputi manusia, keagamaan, Negara, atau yang lainnya. Dalam kajian ini difokuskan pada pemikiran Jankowsky tentang ideologi pada novel Rabet, Runtuhnya Jerman Timur karya Jankowsky. Dengan menggunakan teori ideologi oleh Althusser, bahwa ideologi dalam konteksnya telah menjadikan membenaran terhadap tidak semua kelompok manusia, termasuk dalam konteks kenegaraan, kelompok bawah pun yang terpinggirkan juga memiliki ideologi yang mengorganisasi dan membenarkan gagasan tentang diri mereka dan tentang dunia. Untuk memperoleh makna dalam karya sastra tersebut, penelitian menggunakan teknik penginterpretasian teks secara cermat berdasarkan ungkapan-ungkapan yang dinarasikan secara simbolik. Dengan kajian New Historicism, maka dalam pemaknaannya telah menggunakan teknik menyandingkan antara teks dengan kesejarahan konteksnya. Dari pemaknaan teks demikian telah menghasilkan kesimpulan, bahwa dalam memperjuangkan ideologi pada konteks Negara tidak harus ditempuh dengan kekerasan, akan tetapi ada jalan damai yang terbuka yakni dengan pola "transaksi" ideologi dalam ruang sosial politik antara kelompok atas (penguasa) dan kelompok bawah (rakyat).*

**Kata kunci:** pemikiran pengarang, ideologi, dan *New Historicism*

### Pendahuluan

Sebagai karya kreatif, sastra yang baik selalu meyuarakan konsepsi pengarang tentang kehidupan secara filosofis. Keterkaitan sastra dengan konsepsi pengarang pada gilirannya telah meneguhkan adanya keterkaitan sastra dengan filsafat. Seorang pengarang ketika merefleksikan kehidupan baik secara langsung atau tidak dipengaruhi dan didasarkan pada filsafat-filsafat tertentu, yang kebenarannya diyakini oleh individu atau kolektif.

Unger (Wellek dan Warren, 1995: 141) menegaskan bahwa sastra bukanlah filsafat yang diterjemahkan dalam bentuk pencitraan dan sajak, melainkan sebuah ekspresi sikap yang umum dari seorang pengarang terhadap dunia (kehidupan). Pengarang dalam mendedahkan pemikirannya ini diwujudkan dalam bentuk realitas kehidupan yang sekaligus menjawab persoalan-persoalan kehidupan secara filosofis dengan cara yang tidak sistematis, akan tetapi selalu mengikuti pola-pola kreasi yang dibangun, sehingga

membentuk karakteristik karyanya seiring dengan situasi dan zamannya.

Di samping itu, pengarang dalam merefleksikan kehidupan sangat dipengaruhi oleh realitas yang terbungkus dalam budaya yang ada. Sementara budaya tersebut menurut Damono (2000: xi), selalu bersandar pada sesuatu yang ada, karena tidak akan pernah ada kebudayaan yang diciptakan tanpa dasar sama sekali dan dalam situasi yang mutlak kosong. Oleh karena itu, sastra sebagai bagian dari budaya tidak sekedar bersifat estetis, akan tetapi sastra (Satoto dan Fananie, 2000: v) dapat dipakai sebagai alat kontrol terhadap berbagai penyimpangan nilai-nilai dari berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan agama.

Dalam merefleksikan kehidupan tersebut, di antara para pengarang ada yang lebih menekankan pada *worldview*-nya (pandangan dunia) daripada *weltanschauung*-nya (memperjuangkan dunia) atau sebaliknya, bahkan ada pula yang memadukan keduanya

---

(Darma, 2004: 48-49). Ketika seorang pengarang lebih menekankan sikap *worldview*-nya maka karya sastra yang dihasilkan lebih menunjukkan pada pemeriannya terhadap dunia. Begitu juga, apabila pengarang lebih menekankan pada sikap *weltanschauung*-nya maka karya yang dihasilkan menunjukkan sikap perjuangannya terhadap dunia (kehidupan).

Baik dengan *worldview* maupun *weltanschauung*, pengarang dapat mencakup persoalan kehidupan secara luas, termasuk yang terkait dengan nasib, keagamaan, alam, manusia, masyarakat, atau Negara. Hal ini sebagaimana yang direfleksikan Martin Jankowsky pada novelnya yang berjudul *Rabet, Runtuhnya Jerman Timur*. Dalam karyanya ini Jankowsky tidak sekedar mengekspresikan *worldview*-nya akan tetapi ia lebih menunjukkan sikap *weltanschauung*-nya.

Dengan latar kehidupan sosial-politik Negara, Jerman Timur, terutama pada saat-saat seputar jatuhnya tembok Berlin, apabila dilihat dari *New Historicism* yakni dengan menyandingkan karyanya dengan kesejarahan Jerman, Jankowsky telah mengambil simbol-simbol revolusi damai terutama dalam penentuan ideologi Negara, sosialis atau kapitalis. Ideologi yang tidak sekedar diletakkan sebagai sistem berpikir, akan tetapi sebagai pilar dasar praktek bagi masyarakat dalam bernegara.

Salah satu realitas yang menarik dalam penetapan ideologi Negara tersebut, Martin Jankowsky telah melandasi konsepsinya dengan latar sejarah Negara yang amat panjang. Dengan menengok peristiwa berakhirnya Perang Dunia II (Kunze dalam Jankowsky, 2010: xii) terdapat perpecahan Negara Jerman akibat kalah perang, yakni di satu pihak, dikuasai Negara pemenang perang, Amerika, Inggris, dan Perancis, dan lain pihak dikuasai oleh Rusia sehingga terbentuk dua negara Jerman dengan ideologi yang berbeda. Republik Federasi Jerman yang berideologi barat dan kapitalis terbentuk pada tanggal 23 Mei 1949 dan Republik Demokrasi Jerman yang berideologi timur dan sosialis terbentuk pada tanggal 7 Oktober 1949. Sejak saat itu, selama empat puluh tahun terjadi tembok pemisah antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Tembok pemisah ini sudah barang tentu tidak sekedar sebagai pemisah kedua Negara,

akan tetapi sekaligus menjadi pemisah Negara blok Barat dan blok Timur, sekaligus dengan ideologinya.

Ideologi, secara konseptual mengarah ke dalam dua cara pandang (Thompson, 2014: 14), di satu sisi, ideologi dipandang dengan terminologi murni deskriptif: sebagai sistem berpikir, sistem kepercayaan, praktek-praktek simbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial politik, yang dapat dimasukkan sebagai konsepsi netral (*neutral conception*). Di lain pihak, ideologi tersebut sebagai proses membenaran hubungan kekuasaan yang tidak simetris, perhubungan dengan proses membenaran dominasi, yang melahirkan konsepsi kritis ideologi (*critical conception of ideology*). Penggunaan istilah ideologi yang terakhir telah menimbulkan konotasi negatif yang secara historis selalu mengikat analisis ideologi secara kritis. Sebagaimana telah dinyatakan pula oleh Gramsci (2013: 527), bahwa dalam pertanyaan kritis tentang ideologi tersebut, antara lain, bagaimana konsepsi ideologi telah melewati arti “ilmu pengetahuan gagasan” dan “analisis gagasan asli” untuk mengartikan “gagasan sistem” spesifik yang harus dikaji ulang secara historis. Dalam istilah-istilah logis yang murni, proses akan sangat mudah untuk dicerna dan dimengerti.

Selanjutnya, Gramsci (2013: 529) menjelaskan bahwa konsepsi ideologi organiknya, khususnya, telah menjelaskan yang bersifat historis yang penting untuk struktur yang ada, serta ideologi yang tidak beraturan dan rasionalistik harus dibedakan. Dengan pengertian bahwa ideologi-ideologi tersebut sifatnya penting secara historis, dan mereka mempunyai validitas yang bersifat psikologis; mereka mengorganisasikan masa, dan menciptakan area sehingga manusia mempunyai ruang gerak, dan mendapat wewenang penuh akan posisi mereka, berjuang, dan sebagainya.

Ideologi, sebagaimana yang dikonsepsikan Althusser (Barker, 2005:74) tidak lain merupakan salah satu momen atau level primer suatu formasi sosial. Sebagai level primer, ideologi relatif otonom terhadap level-level lain, misalnya ekonomi, meskipun pada “momen-momen terakhir” justru ideologi tersebut tetap dideterminasi ekonomi. Dalam pemahaman lain, ideologi seringkali

difungsikan untuk menyambut atau menginterpelasi individu konkret dan berfungsi mengonstitusi individu konkret sebagai subjek. Argumentasi ini tentunya menimbulkan aspek antihumanisme, karena subjek tidak dipandang sebagai agen yang mampu membentuk dirinya sendiri (*self-constituting*), melainkan sebagai “efek” dari struktur.

Gramsci dalam memandang ideologi, di satu sisi selalu dikaitkan dengan pola hegemoni, yang selalu muncul dari situasi atas “blok historis” faksi-faksi kelas yang berkuasa menggunakan otoritas sosial dan kepemimpinan atas kelas-kelas subordinatnya dengan cara-cara mengombinasikan kekuatan dengan, yang lebih penting, persetujuan sadar (*consent*). Menurut Gramsci (Barker, 2005:79), ideologi dipahami sebagai gagasan makna, dan praktik-praktik yang, meski tampak seperti kebenaran-kebenaran universal, sebenarnya merupakan peta-peta makna yang menyokong kekuasaan kelompok-kelompok sosial tertentu. Di sinilah yang terjadi adalah hegemoni dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Namun demikian, di lain sisi, ideologi memainkan peran penting dalam menyediakan kesempatan kepada aliansi (yang semula dipahami sebagai pengertian kelas) untuk mengatasi kepentingan-kepentingan yang melingkari mereka. Dengan ideologi dimaksudkan tercapainya “suatu kesatuan sosiokultural”, yang melalui kesatuan tersebut, berbagai kehendak yang berbeda, dengan tujuan yang bermacam-macam, dirangkai menjadi satu kesatuan tujuan tunggal yang berfungsi sebagai landasan konsepsi yang adil dan umum tentang dunia.

Terhadap ideologi tersebut, Althusser (Barker, 2005:84) lebih melihatnya sebagai pembenaran bagi tindakan semua kelompok manusia. Artinya, bagi kelompok bawah yang sekalipun terpinggirkan, juga memiliki ideologi yang mengorganisasi dan membenarkan gagasan tentang diri mereka dan tentang dunia. Tentu saja versi konsep ideologi yang lebih luas ini sekaligus mencakup versi yang lebih sempit. Foucault (Barker, 2005:84), mengimplikasikan konsep ini dalam kekuasaan. Perbedaan antara kelompok dominan dengan kelompok subordinat terletak pada level kekuasaan dan substansi pandangan dunia.

Selanjutnya, Foucault (Barker, 2005:84) menjelaskan bahwa kekuasaan dalam pengertian ini merupakan hasil dari implikasi adanya pengetahuan atau dengan pengertian lain, dalam konsep ini ada hubungan timbal balik yang saling membentuk antara pengetahuan dengan kekuasaan, sehingga pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari rezim-rezim kekuasaan. Pengetahuan terbentuk dalam konteks relasi dan praktik-praktik kekuasaan, dan selanjutnya turut berperan dalam pengembangan, perbaikan, pemeliharaan teknik-teknik kekuasaan yang baru.

Terkait dengan kekuasaan tersebut, Nietzsche lebih menggalinya dengan istilah “kehendak berkuasa”, yang dikaitkan dengan aspek keruhanian manusia dalam melampiaskan nafsunya. Dengan demikian, Nietzsche (Bertens, 1998: 87-88) telah membedakan adanya “moral tuan” dan “moral budak”. Manusia yang hidup menurut “moral tuan” memberanikan diri untuk mewujudkan hawa nafsunya atau tidak memakai ruh sebagai topeng, sementara yang ber-“moral budak” tidak memberanikan diri untuk melampiaskan nafsunya, tetapi menyuruh ruh untuk melakukan hawa nafsunya.

Salah satu pokok ajaran Nietzsche (Bertens, 1998: 88), ialah pendiriannya tentang *der Uebermensch* (Manusia Atas, bahasa Inggris: *Supeman*). Dengan pengertian bahwa Manusia Atas sebagaimana yang dimaksudkan Nietzsche telah diarahkan pada bentuk-bentuk kekuasaan manusia yang tunggal, tidak jamak, atau kekuasaan yang seratus persen secara duniawi tanpa melibatkan Tuhan dan memang dialah merupakan “kehendak untuk berkuasa.” Sebagai contoh, Kaisar Romawi dapat diartikan sebagai dewa dalam konteks masanya, kekuasaan ada pada genggamannya, ia telah menjiwai dirinya adalah tuhan bagi rakyatnya. Begitu juga dalam konteks lain, Manusia Atas telah digabungkan Goethe dan Napoleon menjadi satu pribadi.

### **Pembahasan**

“Manusia Atas”, dalam konteks kekinian, dapat dilihat dalam kekuasaan Negara atas rakyatnya yang melesap ke dalam ideologi, politik, ekonomi, atau agama. Sebuah novel *Rabet, Runtuhnya Jerman Timur* karya Martin Jankowsky menjadi teks dalam sejarah Jerman

Timur yang syarat dengan representasi transaksi ideologi, kekuasaan, bahkan politik Negara secara mendasar. Sebuah pergolakan yang diusung dari kalangan intelektual pemuda yang peduli atas sistem pemerintahan Jerman Timur yang dianggap menjadi kandang (penjara) masyarakat. Sistem pemerintahan yang menganut "mazhab" sosialis, penguasa adalah kekuasaan tunggal, rakyat hanyalah penopang atau penyanggah-penyanggah kekuasaan.

Tidak ubahnya pada peristiwa-pristiwa besar di negara-negara lain, sebuah tempat seringkali menorehkan sejarah baru. Rabet, sebuah jalan di kota kecil Leipzig, Jerman Timur, menjadi sejarah bagi Benjamin Grasmann dan kawannya, termasuk kekasihnya, Gesa. Baik Ben, Gesa, dan kelompok pemuda yang lain paling tidak menjadi simbol kesegaran spirit Negara atau lebih tepatnya rakyat. Gerakan demi gerakan telah didasarkan semangat pengetahuan yang mereka miliki dalam memandang kekuasaan yang korup, kekuasaan yang berlandaskan ideologi yang dianggap "usang."

"Setelah beberapa saat, baru aku mengerti apa yang terjadi. bahwa ada pembunuh di negeri ini, walaupun sangat jarang, itu dari yang aku dengar. Mereka adalah para pesakitan, orang-orang semak belukar, elemen asosial, orang yang dibutakan oleh propaganda imperialisme dari Barat. Bahwa dengan akal sehat, setiap orang tidak berani beroposisi melawan slogan buku tulis merah, tidak terbayangkan. Transparansi! Kutipan Rosa Luxemburg pada kuburan Luxemburg. Kebebasan selalu merupakan kebebasan untuk berpikir berbeda. Rosa Luxemburg dari Berlin Timur yang sudah tiada (Jankowsky, hlm:58-59).

Ungkapan tersebut tampak jelas memberi pemaknaan bahwa sebuah pengetahuan manusia, bisa membangkitkan jalan menuju kekuasaan. Jika Jerman Timur, dalam ideologisasi sosialisnya tidak terlepas dengan landasan pengetahuan filosofinya bahwa sosialis sebagai pilihan dalam penyelenggaraan Negara, maka demikian pula Ben, dalam menghadapi sejarah Negaranya, juga ia melandaskan pada konsep kesadaran yang dibangun bermula dari dirinya sendiri.

Kemudian didasarkan pada pengetahuan terhadap lingkungan sosial yang mereka hadapi.

Dalam kesejarahan, sebuah slogan buku tulis merah memberikan simbol dan representasi dari makna sosialis yang menyebar di dunia. Soviet sebagai induk semang "buku tulis merah" beranak pinak ke Vietnam, Republik Cina, atau Jerman Timur. Buku tulis, dalam *Rabet* menjadi pemaknaan sebuah ungkapan pola-pola penanaman ideologi, dan buku tulis merah dapat dimaknai sebagai representasi wacana yang menyuarakan ideologi Jerman Timur, dan rakyat tidak sedikit pun diberi kesempatan untuk memaknai bacaan-bacaan dengan warna ideologi lain.

Kalaupun dalam konteks realitas sejarah Jerman, Rosa Luxemburg disebut-sebut sebagai tokoh teoretika dan politika sosialis keturunan Yahudi-Polandia, penerus jalan menuju radikal Marxis dalam gerakan demokrasi sosial, bagi Ben tokoh itu tidak lain adalah semacam *discourse* ideologi, atau justru Luxemburg tersebut oleh Ben dianggap sebagai sosok nabi penyelamat dengan tangan menggegam *discourse* yang berbau demokrasi. Sebuah *discourse* tawaran untuk keluar dari kungkungan sosialis Jerman Timur. Luxemburg, sementara itu, dalam realitanya tidak berarti ia mengharuskan Jerman Timur sepenuhnya keluar dari sosialis, akan tetapi dengan ideologi yang berembel-embel demokrasi, paling tidak akan menjadikan *oase* dalam otoritarianisme, serta transparansi dalam segala bidang akan terwujud.

Kesadaran Ben terhadap *discourse* Luxemburg, merupakan kesadaran pemaknaan "yang tertinggal" sebagaimana Nietzsche (Sarup, 2011:64-65) tidak mempercayai adanya kesistematian pada metafisika, kecurigaan pada nilai-nilai "kebenaran" dan "makna." Manusia, secara tradisional merupakan titik pusat dalam pembentukan pengalaman, moralitas, pilihan, dan kehendak. Jika Ben pada perjalanan hidupnya membentuk kesadarannya, serta menjatuhkan pilihan pada ideologi lain, semata-mata hal itu berangkat atas dorongan bawah sadar yang meliputi dirinya, atau moralitas yang menuntunnya. Moralitas dalam diri Ben, dalam satu sisi telah representasikan moral rakyat, namun konstruksi-konstruksinya tidak sebagaimana "moral budak" seperti yang diungkap oleh

Nietzsche. Ben dan kawan-kawannya justru menempati pada oposisi lain, ia selalu bertindak pada posisi “moral tuan”, moral yang tidak memerlukan topeng sebagai penutup wajah kesadaran ideologisnya.

Untuk mewujudkan pilihan ideologinya, Ben tampaknya sadar betul atas otoritarianisme pada Jerman Timur. Jika ideologi sosialis selalu ditamankan Negara melalui buku merah menjadi *discourse* pembenaran terhadap tindakan kelompok manusia sebagaimana pandangan Althusser, namun pola-pola dalam pemahaman rakyatnya selalu disertai tindakan represif sebagai khas tindakan Negara. Dalam menghadapi permasalahan ideologi ini, Ben tampaknya tidak mengambil posisi sebagai oposisi binernya, yang meneguhkan anggapan bahwa Negara sebagai sentral, sementara dirinya yang merepresentasikan sebagai rakyat adalah marjinal. Ben, justru berupaya membangun kesadaran kolektif sebagai upaya menuju titik pusaran yang paling pusat.

Dalam upaya membentuk kesadaran kolektif, Ben sangat sadar bahwa adanya kesadaran diri sendiri, komunitas kecil, adalah proses yang penting sebagai langkah menuju ke kolektivitas besar. Diskusi “rumahan” merupakan gerakan bawah tanah atas upaya mencapai kesadaran baik secara individual maupun kolektif, serta pengayaan *discourse* ideologi dengan berbagai cara, termasuk dengan pola-pola intelektual yang lain, yakni pembacaan teks secara konseptual menjadi kebutuhan sebagai peolehan pengetahuan..

“Orang yang tinggal di kamar warna-warni tanpa ventilasi itu membaca buku-buku non-sosialis. Buku-buku itu mereka peroleh dengan cara menyuruh orang lain mencuri buku-buku tersebut dari ruang tamu pameran buku internasional pada musim semi. Aku ikut-ikutan seperti Gesa, diam-diam minum teh di dapur orang asing dan mengagumi perpustakaan hasil curian dari kloset itu. Ketakutan, kesombongan, dan keinginan berkecamuk dalam kepalku sehingga membuat kepalaku agak panas mendidih. Orang-orang itu memiliki ketenangan yang asing bagiku (Jankowski, hlm. 38).

Pembacaan teks dalam tataran pemahaman ideologi secara konseptual sebagai pembanding

antara sosialis yang masih kokoh di Jerman Timur dengan demokratis yang menjadi kebutuhan mendesak. Jika Negara mewajibkan pemahaman terhadap buku tulis merah sebagai pola yang ampuh dalam penanaman ideologi sosialis untuk membudayakan kolektif dalam konteks Negara, maka kelompok Gesa dan kawan-kawan tidak menganggapnya demikian. Bagi kelompok Gesa, apapun yang dituangkan Negara, termasuk ideologi melalui buku tulis merah tidak lain adalah hanya seolah-olah tampak kebenaran universal, yang sebenarnya merupakan pemahaman-pemahaman yang secara historis bersifat spesifik, yang menyelubung dan melanggengkan kekuasaan.

Pembacaan teks, dalam arti *discourse*, buku-buku non-sosialis yang mengurai ideologi-ideologi lain, bagi kelompok Gesa merupakan bentuk penajaman kecurigaan atas kebenaran-kebenaran yang diakui secara kolektif sebagaimana yang anggap Nietzsche, atas pembenaran ideologi yang dilakukan Negara. Bagi Nietzsche (Sarup, 2011: 140), walaupun konsepsinya tidak dapat dikatakan menolak negara, mungkin lebih tepatnya ia sangat skeptif terhadap Negara, karena baginya Negara tidak lain adalah penjelmaan kekuatan yang mengintimidasi kaum laki-laki dan perempuan ke dalam komformitas. Nietzsche tidak hanya menentang Negara, akan tetapi ia juga menyerang setiap penilaian yang terlalu berlebihan pada politik. Pendek kata, Nietzsche lebih mengedepankan *individu antipolitik yang mencari kesempurnaan diri* di luar dunia modern. Ia memandang manusia goethean merupakan manifestasi tipe kontemplatif besar yang pada dasarnya tidak revolusioner, bahkan antirevolusioner.

Pembacaan teks dalam bentuk buku-buku non-sosialis yang dipelopori Gesa, di samping merepresentasikan perluasan *discourse* ideologis, juga menjadi bentuk konstruksi “baru”, peniadaan subordinasi laki-laki dan perempuan. Dominasi laki-laki tidak selamanya berada pada posisi pusat dan tidak menjadi “liyan”, karena Gesa lah dalam konteks ini justru yang menjadi pusat, dan lebih berperan dalam menuntun kelompoknya, termasuk Ben.

Pemahaman terhadap konsep ideologi, sebagaimana yang dilakukan Gesa dan kawan-kawan bukan berarti tidak memerlukan konsep lanjutan. Bentuk-bentuk gerakan kelompok

sangat diperlukan sebagai awal menuju pembentukan kesadaran kolektif. Ben dan kawan-kawan, sangat menyadari atas ketidakberdayaannya terhadap kekuatan dan kekuasaan Negara. Oleh karena itu, celah-celah yang paling memungkinkan adalah komunitas gereja sebagai alternatif pilihan.

Di depan gereja, dua kendaraan polisi telah menunggu. Lampu biru yang berputar-putar memantul di plester batu pipih dan pantulan itu menjadi ratusan banyaknya, berputar-putar di atas batu jalanan dan membiarkan bayangan para pejalan kaki di dinding rumah menghilang.

Kerumunan bubar dengan cepat.

Kami berdiri di pintu keluar kapel dan berdiam diri menunggu, sampai Magnus menutup pintu.

‘Lain kali beritahu aku dulu tentang aksu kalian.’ Bisiknya memedihkan hati. ‘Kalian harus hati-hati. Beberapa nama telah disampaikan kepadaku. Antara lain nama kalian.’

‘Nama siapa?’ tanya Gesa.

‘Namamu ada,’ kata Magnus dan dengan kunci gereja menunjuk pada Ernst. Dan pada Gesa.

‘Di telepon?’ tanya Ernst dengan heran.

‘Sudah aku katakana, hati-hatilah. Tanyakan dulu padaku lain kali. Aku tidak keberatan jika kalian ingin mengadakan kebaktian. Tapi tolong hanya bersama-sama jemaat.’

‘Kami bicara tentang penangkapan,’ kata Dorothee pelan. ‘Bukan tentang Bapa Kami.’

...

Magnus melihat kepadanya dengan mengancam ‘Geraja akan melakukan segala yang termasuk dalam kekuatannya untuk membantu para tahanan. Situasi sangat genting. Tapi hal itu bukanlah salah kita

‘Anda janji?’ tanya Gesa.

‘Aku berjanji... Nah, pulanglah kalian, orang akan memperhatikan kita.’

Dua polisi muncul dari samping menuju ke tempat kami. Kami buru-buru berpamitan. (Jankowski, 66-68).

Gereja, sebagai tempat pilihan Ben dan kawan-kawan dalam gerakan membentuk perubahan ideologi Negara bukan tanpa alasan. Kesadaran kolektif paling tidak dapat dibangun dari komunitas tertetu, walaupun kecil, tapi mengharuskan adanya kejernihan jiwa. Para jemaat dianggap tidak sepenuhnya terkontaminasi politik Negara, bahkan kelompok gereja secara implisit memberikan pemaknaan dalam konteks realitanya, adalah sebagai “individu” anti politik yang mencari kesempurnaan-diri di luar dunia modern. Bahkan, kelompok yang demikian, oleh Nietzsche, dianggap sebagai kelompok goethean merupakan manifestasi tipe kontemplatif yang pada dasarnya tidak revolusioner, bahkan antirevolusioner.

Munculnya Ernst dalam konteks gerakan gereja, sekilas memang dapat memberikan kesan bahwa Ernest lah satu diantaranya yang paling berperan dalam gerakan-gerakan untuk mengonstruksi kesadaran kolektif atas ideologi. Dari sejarah realitas sosial yang ada, seakan-akan ia menjadi individu “pengukur sejarah”. Pemikiran Ernest, baik secara langsung atau tidak, telah merepresentasikan masa lalu kesejarahan Eropa dalam konteks kapitalis gereja. Gereja, dalam konteks kesejarahan Eropa, telah menjadi bagian dari otoritas keputusan Negara.

Kepala Pendeta Magnus, walaupun pada akhirnya dapat dicap sebagai penghianat bagi Ben dan kelompoknya, karena keperpihakan formalnya pada Negara, justru tidak seharusnya luput dari lebel “kepahlawanan sosial.” Keberhasilan kelompok, baik dari misi-misi yang disuarakan Ben, Gesa, maupun Ernest, justru secara tidak langsung mendapat dukungan Pendeta Magnus. Pendeta Magnus, dengan demikian, dapat diposisikan sebagai individu antirevolusioner, yang lebih menjatuhkan pilihannya pada gerakan-gerakan secara imanen.

Gerakan gereja, dalam satu sisi memang tidak terlepas dengan konsep agama, walaupun dalam konteks Negara sosialis tidak menjadi bagian secara langsung. Artinya, agama menjadi bagian personal atau individu-individu masyarakat, bahkan agama justru diibaratkan dalam perkembangan *infatil* atau dalam jiwa kekanak-kanakan.

“Agama merupakan kesalahan waktu yang menggelikan di Negara para petani dan pekerja. Tingkat perkembangan yang *infatil*, kekanak-kanakan dari revolusi kesadaran diri. Suatu momok yang harus ditanggung dengan sabar, yang akan mencair begitu sinar kemajuan pengetahuan teknologi yang objektif memancar, seperti mencairnya orang-orangan salju di mentari musim semi. Mereka yang belum berhasil dibiarkan mengejar impiannya di suatu tempat penampungan, selama mereka yang sebagai manusia aneh yang tidak terpengaruh oleh sistem yang ada dalam pencapaian kebahagiaan ilmiahnya. Suatu kekurangan, kata Tillmann...(Jankowski, halm.83).

Pernyataan Tillmann tersebut, tampak jelas bahwa agama betapapun membawa kebenaran absolut, namun dalam pandangan Tillman, agama kadang diposisikan sebagai kebenaran kontekstual. Agama, dalam konteks Negara tertentu, misalnya di Timur Tengah, menjadi bagian tak terpisahkan dengan Negara, bahkan di antaranya justru menjadi rasionalisasi ideologi Negara itu sendiri.

Agama, dalam Negara sosialis menjadi hal yang di-“ironikan”, anggapan sebagai *infatil*, dalam satu sisi merupakan representasi perkembangan jiwa kekanak-kanakan bagi masyarakat agamanya, ketidakdewasaan, serta ketergantungan adalah memosisikan agama di bawah lapis intelektualitas dangkal. Namun di lain sisi, agama bagi manusia yang dapat memenuhi intelektual diri, justru menjadi salah satu sumber pancarian ilmiah sebagai pembentuk kebahagiaan mereka. Bahkan dalam pembentukan Negara yang *nota bene* di dalamnya terkandung ideologi, agama bagi individu-individu tidak bisa dikebiri begitu saja, karena agama bisa saja mewujudkan dalam bentuk-bentuk kesadaran yang lain.

Ben dan kawan-kawan, khususnya Ernest, dalam menciptakan kesadaran kolektif melalui gereja, secara jelas sebuah keniscayaan. Hal itu sebagaimana termaksud dalam percakapan antara Ernest dan pengacara Dr. Bergmann.

“Pada persiapan acara malam Senin di gereja Nikolai itu tergabung dalam beberapa kelompok yang ingin

menegaskan reformasi bagi Negara kita. Kami memiliki kontak dengan wakil-wakil kelompok yang ikut merencanakan dan mengkoordinir segala kegiatan di gereja Nikolai. Semua anggota tersebut sedang duduk di depan Anda. Kami bisa berbicara secara terbuka. Seperti yang Anda lihat, kami adalah orang biasa, yang tidak bersenjata dan juga tidak agresif. Kami tidak menginginkan apapun selain berbicara. Sayang, sementara ini timbul permasalahan dan oleh karena itu kami ingin meminta nasihat Anda.”

“Baiklah,” kata Dr. Bergmann, mengangguk. “Tentang apa itu?”

“Baik...” kata Ernest mengambil alih. “Di satu sisi, Kepala Pendeta Protestan Magnus ingin mengambil alih kompetensi kami dengan menentukan sendiri isi doa kebaktian. Sementara itu, di sisi lain, institusi pemerintah berusaha melenyapkan kami.

...

“Secara teratur ada orang-orang tertentu yang ditangkap setelah mengunjungi gereja Nikolai. Begitu meninggalkan gereja, borgol polisi telah menunggu mereka.” (Jankowski, hlm.92-93).

Dari percakapan tersebut, tampaknya apapun bentuknya gerakan Ernest bagi Negara adalah subversif, sebuah tindakan antikemapanan dalam konteks pemerintahan sosialis. Gerakan gereja yang tidak semata-mata tidak ritualitas menjadi tindakan yang dianggap membahayakan kelangsungan Negara. Dari sinilah tampak mulai adanya pertarungan menuju transaksi untuk penguasaan kekuasaan dan pengetahuan, sebagaimana yang dikonsepsikan Michel Foucault (Barker, 2005: 109), bahwa kekuasaan dan pengetahuan adalah sebuah relasi yang saling membentuk, sehingga pengetahuan tidak terpisahkan dari rezim-rezim kekuasaan. Pengetahuan terbentuk dalam praktik-praktik kekuasaan dan turut berperan dalam pembentukan, perbaikan, dan perawatan teknik-teknik baru kekuasaan.

Ungkapan Ernest kepada Dr. Bergmann, dalam mengupayakan kelancaran gerakan gerejanya, menjadi indikasi penguasaan

pengetahuan dalam memilih dan menentukan tindakan sosial secara cerdas. Cara-cara yang ditempuh Ernest, tidak lain adalah dalam rangka merebut kekuasaan Negara melalui wacana intelektual. Begitu juga yang dilakukan Negara, atas tindakan polisi yang selalu bertindak represif, merupakan tindakan kekuasaan yang didorong atas pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki Negara. Dengan demikian, baik Ernest sebagai simbol rakyat, sementara polisi sebagai simbol Negara, keduanya mengambil posisi paralel, satu sama lain berusaha saling memahami, bahkan keduanya menjadi pengontrol sekaligus terkontrol.

Dari pihak pengontrol dan terkontrol, Negara dan Rakyat Jerman Timur, dalam konteks penentuan kelangsungan Negara, tidak terlepas dengan hal-hal yang mendasar, yakni ideologi. Ideologi dalam konteks ini tidak lain adalah sebagaimana yang dimaksudkan Althusser, yaitu pembenaran bagi tindakan semua kelompok manusia. Artinya, kelompok bawah pun yang terpinggirkan juga memiliki ideologi yang mengorganisasi dan membenarkan gagasan tentang diri mereka dan tentang dunia. Kedua kelompok memiliki peluang. Tuntutan para demonstran secara jelas memosisikan diri mereka sebagai pihak yang punya kuasa juga.

“Pak Grasmann! Tuntutan apa yang diminta para demonstran, dan kepada siapa?”

“Aku hanya bisa menyebutkan beberapa pengangkatan, tak terdapat keterangan yang resmi. Hak atas kebebasan berpendapat . pemilihan yang bebas. Kebebasan informasi. Pembukaan perbatasan Negara. Pengakhiran sensor. Pembolehan perekonomian swasta. Yang bebas selain yang dari pemerintah. Pelenyapan partai tunggal.”

“Dan untuk siapa tuntutan itu ditujukan?”

“Ke sekelompok kecil lelaki yang agak tua, yang bertempat tinggal di suatu tempat raasi. Dan kepada para anak emas mereka yang giat di seluruh negeri. Jumlahnya tidak diketahui.” (Jankowski, hlm. 207).

Wawancara Grasmann dengan wartawan tersebut, merepresentasikan sejarah Jerman

Timur yang sedang dilanda tuntutan rakyat ketika rakyat menginginkan dihapusnya sistem sosialis. Tuntutan atas kebebasan berpendapat, pemilihan yang bebas, kebebasan informasi, pembukan perbatasan Negara secara jelas merepresentasikan tuntutan terhadap Negara yang menjalankan politik yang dilandasi ideologi sosialis. Adapaun pembukaan perbatasan Negara, dari sisi realitas kesejarahan tidak lain adalah Tembok Berlin yang sekian lama telah menyekat Jerman Barat dan Jerman Timur. Kata rakyat, maknanya dapat dirunut atas pernyataan Grasmann ketika menyebut: kelompok “lelaki yang agak tua”, para anak emas yang giat di seluruh negeri”, dan “jumlahnya tidak diketahui.” Grasmann, dengan demikian, sebagai simbol rakyat yang penuh dengan kegelisahan atas praktik-praktik politik, ekonomi, sosial yang terkonstruksi ideologi sosialis. Tanggapan Grasmann, telah menjadi aktualisasi kelompok pemuda yang menempuh jalan transaksi dengan Negara atas ideologi sebagai landasan pelaksanaan Negara dan pemerintahan yang dianggap lebih representatif secara kontekstual pada Jerman Timur.

Transaksi ideologi tersebut diperjelas ketika Grasmann mendapat pertanyaan sebagai berikut.

“Pak Grasmann! Tindakan pengaman apa yang dimiliki oposisi di Negara Anda ketika sedang bernegosiasi dengan pemerintah? Apa rencana mereka? Siap orang-orang yang bertugas untuk mensukseskan negosiasi tersebut?”

“Para siswa pesulap, pikirku tiba-tiba. Kami adalah pelajar pesulap.” (Jankowski, hlm. 208).

Kata negosiasi, dalam konteks politik Negara, tidak merupakan pernyataan yang bersimbol revolusiner, bahkan suatu langkah politik yang mencerminkan sikap antirevolusiner. Ketika tembok Berlin dirobokkan pun dalam sejarah Jerman, pada saat itu, memang dipicu atas tuntutan rakyat secara bergelombang, namun dalam menghadapi tuntutan tersebut, Jerman secara politis internal secara nyata bisa “mengatasi” secara “dewasa.”



---

### Kesimpulan

Dalam mengekspresikan penentuan ideolog Negara, khususnya bagi Jerman Timur, Jankowski mengekspresikannya melalui tokoh-tokohnya baik yang tergolong generasi muda maupun generasi tua menunjukkan masing simbolnya. Munculnya generasi muda telah menimbulkan pemaknaan adanya fase sejarah kekinian, sementara bagi generasi tua juga menjadi simbol sejarah masa lalunya. Dari sinilah, sebenarnya apa yang lakukan Ben, Gesa, dan komunitasnya merupakan representasi kesejarahan Jerman Timur dalam bertransaksi ideologi dengan rakyatnya. Transaksi untuk mendapat ideologi sosialis atau demokratis dengan cara-cara damai merupakan salah satu bentuk perjuangan intelektualisme yang memberikan aksent tersendiri.

Transaksi ideologi dalam konteks Negara yang telah dilakukan antara penguasa (Negara) dan rakyat sebagaimana yang digambarkan Jankowski telah menunjukkan adanya dorongan hidup yang dipicu oleh “kehendak untuk berkuasa”, sebagaimana yang konsepkan Nietzsche. Begitu juga cara yang ditempuh, tentu tidak harus dengan jalan kekerasan, walaupun sebenarnya ideologi pada kenyataannya sangat dekat dengan kekuasaan (politik, negara). Penentuan ideologi dapat pula ditentukan dengan cara-cara damai, bahkan oleh kelompok masyarakat yang selama itu dianggap liyan (terpinggirkan).

### Daftar Pustaka

- Barry, Peter. 2010. *Pengantar Komprehensif Teori Sastra dan Budaya: Beginning Theory*. Terjemahan Harviah Widiawati dan Evi Setyarini. Yogyakarta: Jalasutra.
- Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Terjemahan Tim Kunci

- Cultura Studies Center. Yogyakarta: Bintang.
- Bertens, K. 1998 (Cet. Ke-15). *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Damono, Sapardi Djoko. 2000. *Kebudayaan (di Sekitar) Kita*. dalam Satoto, Sudiro dan Fananie, Zainuddin. 2000. *Sastra, Ideologi, Politik, dan Kekuasaan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Darma, Budi. 2004. *Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Gramsci, Antonio. 2013. *Prison Notebooks: Catatan-catatan dari Penjara*. Terjemahan Teguh Wahyu Utomo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jankowski, Martin. 1999. *Rabet, Runtuhnya Jerman Timur*. Terjemahan Safriati Tanjung. Wakto.
- Sarup, Madan. 2011 (Cet. Ke-2). *Poststrukturalisme dan Posmodernisme*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Satoto, Sudiro dan Fananie, Zainuddin. 2000. *Sastra, Ideologi, Politik, dan Kekuasaan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Thompson, John B. 1914. *Analisis Ideologi Dunia: Kritik Wacan Ideologi-Ideologi Dunia*. Terjemahan Haqqul Yaqin. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Wellek, Rene dan Warren, Austin. 1977. *Teori Kesusastraan*. Terjemahan Melani Budianta. 1995 (Cet. Ke-4). Jakarta: Gramedia.
- Wolfreys, Juliana. 1999. *Literary Theories Areader and Guide*. New York: New York University Press.
-